

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Aminah dan Roikan. (2019) *Pengantar Metode Peneitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Budiardjo, Miriahm. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fakih, Mansour. (1996). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hanum, Farida. (2018). *Kajian & Dinamika Gender*. Malang: Intrans Publishing
- Haspels, N, dan Suriyasarn, B. (2005). *Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak Serta Perdagangan perempuan dan Anak: Panduan Praktis Bagi Organisasi*. Jakarta: ILO-IPEC
- Indiahono, Dwiyanto. (2017). *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moelong, Lexy J. (2017) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Nugroho, Riant. (2008). *Gender dan Strategi Pengarusutamaan Gender Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: alfabeta.

Winarno, Budi. (2016). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*.  
Yogyakarta : CAPS (Center of Academic Publishing Service).

**Sumber Jurnal:**

Adam, A. (2021). *Pro Kontra Rancangan Undang Undannng Penghapusan Kekerasan Seksual*. Al-Wardah: Jurnal dan Kajian Perempuan, Gender dan Agama, 15(1), 1-15.

Ashady, Suheflihusnaini dan Abd. Hasan. (2021). *Kebijakan Rumah Aman Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Vol. 2(3). Yogyakarta: Universitas Mataram

Farid, M. R. A. A. (2019). *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center*. SAWWA: Jurnal Studi Gender, 14(2), 175-190.

Fatimah, S., dan Ummul Fithriyyah, M. (2023). *Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual (TPKS) Di Kota Pekanbaru: Peluang dan Tantangannya*. JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik , 4(2), 100-107.  
<<https://doi.org/10.30656/jdkp.v4i2.7199>>

Freidenvall, L., dan Ramberg, M. (2019). *Implementing Gender Mainstreaming in Swedish Model Municipalities*. Politics & Gender, 17(2), 225–249.  
<<https://doi.org/10.1017/s1743923x18001022>>

Gilang dan Wiwin. (2021). *Tinjauan Sistematis Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif*. Jurnal MEDIAPSI, Vol. &, No.2, 119-129.

Hairi dan Latifah (2023). *Implementasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*”. Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan kesejahteraan, Vol. 14(2), 163-179. Jakarta: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Hidayat, Alda Rahmawati dan Franky Liauw. (2021) . *Rumah Aman untuk Korban Kekerasan Seksual*. Vol 3(1), 341-352. Jakarta: Universitas Tarumanegara

Mergaert, Lut dan Lombardo, E. (2014). *Resistance To Implementing Gender Mainstreaming In EU Research Policy*. European Integration Online Papers, Vol. 18(5). diakses pada <https://ssrn.com/abstract=2523414>

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
Keputusan Menteri PPA Nomor 130 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Perda Kota Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius

#### **Artikel Internet:**

Asal-Usul Nama Kota Tasikmalaya Dan Perjalanan Perubahan Dari Nama Sukapura.  
Pikiran Rakyat.com. Melalui

<<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-015841263/asal-usul-nama-tasikmalaya-dan-perjalanan-perubahan-dari-nama-sukapura>>

Dampak Psikologis Korban Kekerasan Seksual yang Tidak Boleh Dianggap Sepele, Bisa Berakibat Fatal Melalui <https://narasi.tv/read/narasi-daily/dampak-psikologis-pada-korban-kekerasan-seksual>

Gambaran Umum Kota Tasikmalaya. E-PPID Kota Tasikmalaya. Melalui <https://tasikmalayakotappid.kpu.go.id/info/0/4356/gambaran-umum-kota-tasikmalaya>

Kekerasan Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. Jakarta: Komnas Perempuan. Melalui

<<https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>>

KemenPPPA Optimis 2024, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lebih Maju. Melalui

<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxOQ==>

Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS. Melalui

<https://nasional.tempo.co/read/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks>

Mariana Amiruddin: KUHP Tidak Cukup! Mengundang RUU PKS adalah Bentuk Pemenuhan Hak Konstitusional Korban dan Warga Negara. Melalui

<https://www.jurnalperempuan.org/tokoh-feminis/mariana-amiruddin-kuhp-tidak-cukup-mengundang-ruu-pks-adalah-bentuk-pemenuhan-hak-konstitusional-korban-dan-warga->

negara?locale=en<https://www.jurnalperempuan.org/tokoh-feminis/mariana-amiruddin-kuhp-tidak-cukup-mengundang-ruu-pks-adalah-bentuk-pemenuhan-hak-konstitusional-korban-dan-warga-negara?locale=en>

Pembangunan Rumah Aman, Bentuk Perlindungan bagi Korban Kasus Kekerasan Melalui <https://www.liputan6.com/health/read/4865660/pembangunan-rumah-aman-bentuk-perlindungan-bagi-korban-kasus-kekerasan>

Sejarah Kota Tasikmalaya. JDIH. Melalui

<<https://jdih.tasikmalayakota.go.id/house/sejarah-kota-id>>